



Penguatan *science based policy* pada pemanfaatan riset dan inovasi guna mewujudkan daya saing daerah

Sarjiyanto^{1*}, Tuhana¹, Sudarsana¹, Leny Novianti¹, Dewi Ismoyowati¹, Nurul Istiqomah¹, Ary Setyawan¹, Izza Mafruhah¹, Yudi Rinanto¹, Asep Yudha Wirajaya¹, Dian Noor Citra Perdana²

¹Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

²Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wijaya Mulya, Surakarta, Indonesia

*email Koresponden Penulis: masyanto@staff.uns.ac.id

Info Artikel

Riwayat Artikel

Diajukan: 2024-01-13

Diterima: 2024-03-12

Diterbitkan: 2024-03-21



Lisensi: *cc-by-sa*

Copyright © 2024 Penulis

ABSTRAK

Transformasi Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BAPPELBANGDA) menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) mempunyai konsekuensi diantaranya perlu menyusun blueprint dalam upaya meningkatkan penelitian, pengembangan, pendayaan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan inovasi daerah berdasarkan *science based policy* guna menciptakan daya saing daerah. Namun demikian, permasalahan mitra saat ini khususnya BAPPERIDA adalah hasil penelitian belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh perangkat daerah dan Pemerintah Daerah juga belum memiliki blueprint atau roadmap penelitian dan inovasi untuk 5-10 tahun kedepan yang inovatif dan sesuai kebutuhan daerah. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pendampingan dan penguatan kepada BAPPERIDA Solo Raya melalui implementasi *science based policy* melalui penguatan penelitian, pengembangan, dan inovasi dalam rangka meningkatkan daya saing daerah. Metode yang digunakan adalah metode Participatory Action Research (PAR) dengan berpartisipasi dalam kegiatan penyusunan roadmap dan implementasi *science based policy*. Hasil pengabdian adalah masukan dan rancangan blueprint dan roadmap BAPPERIDA Kabupaten/ Kota di Solo Raya. Peningkatan pemahaman aparatur tehnokratik tentang pentingnya kebijakan berdasarkan penelitian. Hal ini membantu BAPPERIDA Kabupaten/ Kota Solo Raya mengoptimalkan pemanfaatan hasil penelitian dan inovasi baru dalam menciptakan produk kebijakan dan semakin kuatnya *science based policy* dalam mewujudnya daya saing daerah.

Kata Kunci: *science based policy*; kebijakan daerah; daya saing

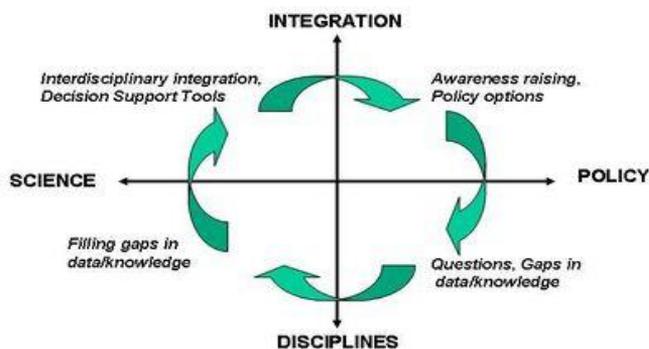
Cara mensitasi artikel:

Sarjiyanto, Tuhana, Sudarsana, Novianti, L., Ismoyowati, D., Istiqomah, N., Setyawan, A., Mafruhah, I., Rinanto, Y., Wirajaya, A. Y., & Perdana, D. N. C. (2024). Penguatan *science based policy* pada pemanfaatan riset dan inovasi guna mewujudkan daya saing daerah. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 5(1), 179-186. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v5i1.21517>

PENDAHULUAN

Penerapan *Science-Based* dalam perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan di Indonesia masih menjadi hal yang baru sebagai strategi menciptakan daya saing daerah. *Science-Based Policy* penting diimplementasikan

untuk dapat menekan dominasi kepentingan politik dan lebih mengedepankan kepentingan publik dalam proses pengambilan kebijakan di daerah (Iswanto, 2023) Penerapan *Science-Based Policy* menjadi urgensi dalam agenda perencanaan pembangunan daerah, khususnya di Kabupaten/ Kota Solo Raya (Sukoharjo, Klaten, Boyolali, Karanganyar, Sragen, Wonogiri dan Surakarta). Dalam rangka percepatan pembangunan dan daya saing daerah di Solo Raya, diperlukan: penguatan kebijakan-kebijakan daerah berbasis riset; penguatan dan pengintegrasian fungsi penelitian dan pengembangan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat. Daya saing tidak hanya berorientasi pada indikator ekonomi saja, tetapi daya saing tersebut diartikan sebagai kemampuan daerah untuk menghadapi tantangan dan persaingan global untuk peningkatan kesejahteraan hidup rakyat yang nyata dan berkelanjutan serta secara politis, sosial dan budaya dapat diterima oleh seluruh masyarakat di suatu daerah (Tri et al., 2022).



Gambar 1. Model konseptual idealis dari interaksi science-policy

Science Based Policy merupakan sebuah upaya memadukan antara kebijakan publik dan ilmu pengetahuan (Pedersen, 2014). Konsep *Science Based Policy* oleh Marjovi & Zarei (2023) menyatakan tidak mudah untuk diterapkan karena harus menggabungkan antara logika ilmuwan (*scientist*) dan logika pemangku kebijakan (*policy maker*). Ilmu pengetahuan menyediakan bukti ilmiah untuk memasukkan isu ke dalam agenda kebijakan (Head, 2008). Melalui bukti ilmiah itu juga, pemangku kebijakan mampu meyakinkan diri bahwa isu tersebut benar-benar ada dan bermasalah. Perumusan kebijakan tidak dapat terlepas dari faktor politik, ideologi, serta ekonomi, sehingga seringkali mengesampingkan faktor bukti ilmiah. Dalam hal ini diperlukan perantara yang dapat menjadi penghubung, yaitu BRIDA (Virgowansyah, 2022).

Berdasarkan ketentuan Pasal 66 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten wajib membentuk Badan Riset Inovasi Daerah (BRIDA). Regulasi ini ditindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120/5434/SJ tanggal 12 September 2022 terkait pembentukan BRIDA, Berdasarkan regulasi tersebut beberapa Pemerintah Daerah di Solo Raya telah menindaklanjutinya melalui transformasi Badan

Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BAPPELBANGDA) menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA).

Adanya transformasi BAPPELBANGDA menjadi BAPPERIDA membawa konsekuensi perlunya penyusunan blueprint dalam rangka meningkatkan penelitian, pengembangan, pendayaan IPTEK, dan inovasi daerah berdasarkan Science Based Policy untuk membangun daya saing, kemandirian dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Namun, permasalahan mitra saat ini adalah: 1) Dukungan sumber daya aparatur belum optimal dalam pelaksanaan fungsi lembaga sebagai sumber science based policy, 2) hasil rekomendasi belum sepenuhnya dimanfaatkan secara maksimal oleh perangkat daerah maupun pemerintah daerah; 3) belum memiliki blueprint atau roadmap penelitian dan inovasi untuk 5-10 tahun kedepan yang inovatif dan sesuai kebutuhan. Oleh karena itu, tujuan pengabdian ini adalah memberikan pendampingan dan penguatan kepada OPD BAPPERIDA Kabupaten/ Kota di Solo Raya melalui implementasi science based policy melalui penguatan penelitian, pengembangan, dan inovasi dalam rangka meningkatkan daya saing daerah.

Kegiatan pengabdian ini juga melibatkan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Propinsi Jawa tengah yang merupakan unsur Pembina dan fungsi koordinasi daerah dalam rangka menciptakan harmonisasi dan sinkronisasi program dan kegiatan pembangunan di Jawa Tengah. Tim Pengabdian dari Pusat Pengkajian Kebijakan Daerah (PPKDK), sebagai unsur Perguruan Tinggi melakukan fungsi fasilitasi dan inisiasi program kegiatan ini sebagai perwujudan pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi, khususnya bidang Pengabdian Kepada Masyarakat.

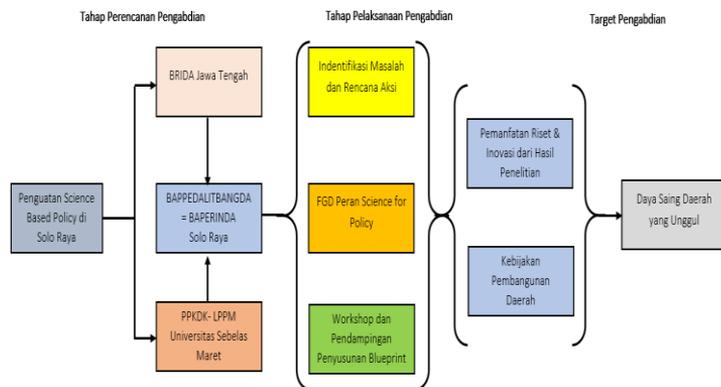
METODE

Metode pengabdian yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pendekatan kaji-tindakan, Menurut Karsidi (2001) pendekatan kajitindak merupakan suatu bentuk riset yang memperdayakan objek masyarakat melalui pengamatan dan tindakan secara langsung pada objek tersebut. Sedangkan bentuk partisipasi objek yaitu Perwakilan BAPPERINDA di Solo Raya di intervensi dengan bentuk PAR (*Participatory Action Research*). Terdapat empat tema dasar dalam PAR, yaitu kolaborasi melalui partisipasi, mendapat pengetahuan, dan perubahan sosial (Afandi, 2020). Menurut Kusuma Sulyandari et al. (2023) PAR memiliki metode berbagi cerita, wawancara mendalam dan diskusi kelompok terfokus (*Focus Group Discussion*). Pengabdian ini mengkombinasikan metode dan pendekatan tersebut untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam rencana kegiatan pengabdian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahapan pengabdian masyarakat ini dilakukan melalui tiga (3) tahapan; tahap pertama adalah perencanaan kegiatan dilakukan dengan menyusun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dengan melibatkan Tim Internal Pengabdian yaitu anggota Peer Group Pusat Pengkajian Kebijakan Daerah dan Kelembagaan, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (PPKDK - LPPM)

Universitas Sebelas Maret. Setelah tahap perencanaan telah disusun secara detail setiap agenda dan penanggungjawabnya, Maka selanjutnya tahap pelaksanaan kegiatan pengabdian dijalankan melalui tiga kegiatan utama; Identifikasi permasalahan, pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FDG) antar pemangku kepentingan dan fasilitasi workshop dan pendampingan oleh Tim Pengabdian dari PPKDK-LPPM UNS. Tahap ke tiga adalah target yang ingin dicapai dalam pengabdian kepada masyarakat, yaitu terciptanya daya saing daerah bersumber dari kebijakan-kebijakan daerah yang dasar penyusunannya menerapkan hasil riset dan inovasi. Tentunya target ini, merupakan target jangka panjang. Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat pada tahap awal ini, setidaknya telah membantu OPD dan Staf dibidang BAPERINDA di Solo Raya telah memahami peran penting riset dan inovasi menjadi dasar penyusunan kebijakan perencanaan dan pembangunan di daerah. Gambaran tahapan pengabdian seperti pada gambar 2 dibawah ini:



Gambar 2. Tahapan pelaksanaan pengabdian

Daya saing negara atau bangsa akan tergantung oleh kemajuan setiap pemerintah daerah dalam menjalankan sistem otonomi daerah secara tepat serta koordinasi yang intensif dengan pemerintah pusat. Salah satu upaya yang dilakukan dalam pengabdian ini adalah dengan melakukan pendampingan pada pemerintah daerah. Pendampingan ini adalah proses pembuatan ekosistem inovasi daerah berbasis science. Metode yang dipilih melalui FGD (*Focus Group Discussion*) oleh (Sugarda, 2020) karena metode ini lebih eksploratif dan dapat menggali secara mendalam akan isu yang sedang di bahas. Kelebihan FGD dipilih karena; pertama fokus pada topik atau isu yang dibahas, kedua fokus dalam demografis dan pola prilaku peserta dan ketiga fokus dalam menciptakan suasana rileks santai untuk memunculkan ekspresi tulus dan spontan.

lintas fakultas dan lintas disiplin ilmu antara lain; kepakaran hukum tata negara, ekonomi pembangunan, kependidikan dan kepelatihan, ilmu lingkungan, pertanian dan peternakan, sastra dan ilmu budaya, sosiologi, politik dan ilmu teknik. Berdasarkan latarbelakng kepakaran dan pengalaman masing-masing anggota dari Pusat Studi PPKDK-LPPM UNS ini, diharapkan menjadi fasilitator yang cukup membantu bagi OPD BAPERINDA di Solo Raya dalam percepatan transformasi BAPPELITBANGDA menjadi BAPERINDA dan penguatan *Science Based Policy* sebagai strategi menciptakan daya saing daerah.



Gambar 5. Anggota Pusat Studi PPKDK-LPPM UNS dari lintas Fakultas dan Kepakaran

Hasil pengabdian secara umum dapat dibedakan menjadi dua bagian, pertama dalam jangka pendek tahapan pengabdian sudah terlaksana sesuai target dan rencana yang telah disusun. Disamping target jangka pendek, untuk memenuhi kewajiban luaran pengabdian bagi lembaga LPPM UNS adalah laporan kegiatan dan publikasi artikel pengabdian secara ilmiah dan rilis media. Jangka panjang dari pengabdian ini adalah terwujudnya ekosistem kebijakan berbasis riset. Pengabdian ini tentunya harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan berkesinambungan untuk mencapai hasil yang optimal. Sehingga diperlukan program lanjutan pengabdian ini dengan metode dan pendekatan yang berbeda untuk mencapai target dan sasaran yang lebih luas dan level hasil yang lebih tinggi.



Gambar 6. Peserta sosialisasi dan FGD dari Perwakilan OPD BAPERINDA Solo Raya

Berdasarkan umpan balik peserta yang mengikuti program pengabdian ini, rata-rata merasa cukup puas dan menyatakan bermanfaat bagi individu maupun bagi instansinya dalam pengarusutamaan *Science Based Policy* sebagai strategi menciptakan daya saing daerah. Hasil umpan balik dari kuesioner yang di berikan kepada peserta, menunjukkan peserta merasa perlu dan bermanfaat dari kegaitan pengabdian ini. Disamping itu sebagian peserta berharap ada pendampingan dan kerjasama yang lebih teknis dalam agenda penyusunan dokumen kebijakan pembangunan di daerah dengan mengimplentasikan *Science Based Policy*.

SIMPULAN

Capaian kegiatan pengabdian ini sudah sesuai target dan tujuan yang ditetapkan. Permasalahan mitra terkait dukungan sumber daya aparatur belum optimal dalam pelaksanaan fungsi lembaga sebagai sumber *science based policy*, Hasil rekomendasi belum sepenuhnya dimanfaatkan secara maksimal oleh perangkat daerah maupun pemerintah daerah sudah diselesaikan dengan solusi melalui kegiatan sosialisasi dan FGD tentang *science based policy*, peran riset dan inovasi bagi peningkatan daya saing daerah. Sedangkan permasalahan mitra belum memiliki blueprint atau roadmap penelitian dan inovasi untuk 5-10 tahun kedepan yang inovatif dan sesuai kebutuhan. Solusi yang ditawrkan adalah Pelatihan berupa workshop penyusunan roadmap. Target pelaksanaan pengabdian adalah sebesar 80% perwakilan OPD BAPERINDA hadir mengikuti sosialisasi, FGD dan pelatihan penyusunan blueprint dan roadmap. Berdasarkan instrument umpan balik/ penilaian peserta memahami *science based policy*, peran riset dan inovasi bagi peningkatan daya saing daerah, hal ini menjadi ukuran tingkat keberhasilan kegiatan pengabdian ini.

Tindak lanjut dari pengabdian ini adalah perlu dilakukan pengukuran dan evaluasi terhadap konsep *science based policy*, yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah di Solo Raya. Pengukuran manfaat dan dampaknya terhadap daya saing daerah perlu dikaji kembali secara mendalam dan melalui riset. Sehingga hasil pengabdian ini perlu dilanjutkan ke tahapan penelitian.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Pusat Pengkajian Kebijakan Daerah dan Kelembagaan (PPKDK) dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) yang telah memberikan dukungan pendanaan berdasarkan Kontrak Penugasan Pengabdian Masyarakat Dana Non ABPN Universitas Sebelas Maret Tahun 2023, SK No. 229/UN27. 22/PM. 01. 01/2023.

DAFTAR RUJUKAN

- Afandi, A. (2020). *Participatory Action Research (PAR) Metodologi Alternatif Riset Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Transformatif*.
- Head, B. W. (2008). Three lenses of evidence-based policy. *Australian Journal of Public Administration*, 67(1), 1–11. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8500.2007.00564.x>

- Iswanto, D. (2023). Analisis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 Dalam Perspektif Evidence Based Policy. *Jurnal Inovasi Daerah*, 2(2), 167-178. <https://doi.org/10.56655/jid.v2i2.134>
- Karsidi, R. (2001). Paradigma Baru Penyuluhan Pembangunan dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Mediator*, 2(1).
- Kusuma Sulyandari, A., Umami, S., Ningtiyas, I., Sulistiyowati, R., Istiana Yulva, F., Hamzah, M., Sa, N., & Artikel, R. (2023). Inovasi olahan ampyang coklat sebagai upaya pemanfaatan nasi aking Info Artikel ABSTRAK. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 4(4). <https://doi.org/10.33474/jp2m.v4i4.19610>
- Marjovi, A., & Zarei, B. (2023). Design-oriented policy interventions: The case of technology-based international entrepreneurship in emerging context. *Journal of International Entrepreneurship*, 21(1), 111-142. <https://doi.org/10.1007/s10843-022-00316-z>
- Pedersen, D. B. (2014). The Political Epistemology of Science-Based Policy-Making. *Society*, 51(5), 547-551. <https://doi.org/10.1007/s12115-014-9820-z>
- Tri, R., Yulianto, L., & Albab, U. (2022). Indeks Daya Saing Daerah. *Jurnal Bengawan Solo: Pusat Kajian Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta*, 1(1), 51-72.
- Sugarda, Y. (2020). *Panduan Praktis Pelaksanaan Focus Group Discussion Sebagai Metode Riset Kualitatif*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Virgowansyah, C. (2022, May). *Fasilitasi dan Pemantauan Riset dan Inovasi Daerah*. Webinar dengan tema BRIDA sebagai inisiator Science Based Policy di Daerah.